

Pedagogi Kritis di Era Post-Truth: Model Pembinaan Pemuda Anti-Hoaks

Vrizt Rianto Ompusunggu

Sekolah Tinggi Teologi HKBP, Pematangsiantar, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

teachers will fall;
post-truth;
hoaks;
The Youth of the Church;
Digital Literacy

Article history:

Received 2026-06-27

Revised 2026-07-27

Accepted 2026-08-31

ABSTRACT

The post-truth era is characterized by the strengthening of emotions and subjective beliefs over facts, so that hoaxes become a serious threat to social life, including the church community. Church youth are a group that is vulnerable to digital disinformation due to the high intensity of social media use, weak digital literacy, and lack of a culture of critical thinking. This article aims to formulate a model of anti-hoax youth development based on critical pedagogy in the post-truth era, with a study on the youth of HKBP Parsaoran Tegal Sari. The research uses a qualitative approach with a case study method, through interviews, observations, and literature studies. The findings show that the vulnerability of youth to hoaxes is caused by a combination of psychological factors, low digital-theological literacy, and the absence of critical dialogue spaces in the church. Based on Paulo Freire's critical pedagogy framework, this article offers six coaching models: digital literacy catechization, critical discussion communities, *digital discernment* training, thematic sermons and PAs, *church fact-checking* teams, and youth-pastor-parhalado collaboration. This model is expected to form critical, ethical, and faithful youth in dealing with hoaxes.

This is an open access article under the CC BY SA license.



Corresponding Author:

Vrizt Rianto Ompusunggu

Sekolah Tinggi Teologi HKBP, Indonesia, aronrh78@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Fenomena penyebaran hoaks di ruang digital Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama akibat penetrasi internet yang cepat dan kultur media sosial yang memprioritaskan kecepatan dibanding verifikasi (Lim, 2020). Berbagai riset menunjukkan bahwa algoritma platform digital secara inheren memperkuat konten yang memicu emosi, sehingga hoaks yang bersifat sensasional menjadi lebih mudah viral daripada informasi faktual (Heryanto, 2020). Situasi ini menandai apa yang disebut sebagai era post-truth, yaitu era ketika emosi dan keyakinan subjektif lebih dipercaya daripada fakta (Keyes, 2018). Dalam konteks ini, hoaks bukan lagi sekadar problem teknologi, tetapi problem sosial-budaya yang memengaruhi dinamika persekutuan dan kehidupan gerejawi.

Kelompok pemuda menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap paparan *misinformation* dan *disinformation*. Kerentanan ini bukan semata karena mereka “naif,” melainkan karena tingginya intensitas penggunaan media sosial, kebutuhan untuk merasa “selalu terhubung,” serta tekanan identitas yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh narasi populer tanpa proses refleksi kritis (Boyd, 2014). Di sisi lain, generasi muda cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap konten yang terlihat estetik dan persuasif secara visual, meskipun tidak akurat (Wardle & Derakhshan, 2017). Situasi ini menyebabkan pemuda gereja sering kali menyerap narasi digital secara pasif, sehingga kemampuan mereka untuk membedakan mana kebenaran, opini, propaganda, atau manipulasi menjadi semakin menurun.

Dampak dari paparan hoaks terhadap kehidupan bergereja sangat serius. Munculnya polarisasi internal, kecurigaan antarkelompok pelayanan, penurunan kepercayaan terhadap majelis atau pendeta, serta meningkatnya konflik interpersonal menjadi fenomena yang tidak lagi jarang ditemukan (Soukup, 2021). Lebih jauh lagi, hoaks mengikis karakter etis umat karena membiasakan mereka pada cara berpikir reaktif, emosional, dan tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran. Dalam konteks gereja, hal ini berbahaya karena hoaks pada akhirnya memengaruhi spiritualitas jemaat: mereka tidak hanya salah memahami isu publik, tetapi dapat salah memahami kehendak Allah akibat distorsi informasi yang terus-menerus (Balentine, 2018). Dengan demikian, hoaks bukan sekadar ancaman sosial, tetapi ancaman teologis yang mempengaruhi integritas iman.

Dalam realitas Indonesia, hoaks tidaklah sekadar teori: ada korban nyata dari penyebaran informasi keliru. Misalnya, pada 23 November 2022 tersebar video di WhatsApp yang mengklaim bahwa seorang pemuda jadi korban pembegalan di Perempatan Burikan, Kudus, Jawa Tengah. Namun, Polres Kudus kemudian mengklarifikasi bahwa video tersebut keliru: korban bukan dibegal, melainkan mengalami kecelakaan tunggal (Diskominfo Jawa Tengah, 2022). Di sisi lain, hoaks-historis seperti pesan penculikan anak yang beredar luas di berbagai daerah juga pernah memicu kepanikan masyarakat dan respon polisi (Puspita, 2023). Dampak hoaks bahkan bisa sangat berat dan berujung tragis. Sebuah laporan Cek Fakta—Liputan6 mencatat “sederet hoaks yang memakan korban hingga merenggut nyawa”, mulai dari isu kriminal hingga kecelakaan akibat disinformasi (Liputan6, n.d.). Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa hoaks bukan hanya merusak reputasi atau menyesatkan pemikiran, tetapi secara nyata bisa menimbulkan luka sosial, emosional, bahkan kematian dalam masyarakat.

Di banyak gereja, termasuk dalam konteks pelayanan pemuda, minimnya literasi digital dan literasi teologis menjadi faktor yang memperparah situasi. Banyak pemuda gereja belum mampu membaca realitas digital secara kritis, sementara pemahaman teologis mereka tidak cukup kuat untuk menilai suatu informasi berdasarkan prinsip kebenaran, keadilan, dan kasih (Campbell, 2016). Kurangnya ruang edukasi bagi pemuda dalam gereja menyebabkan mereka lebih dipengaruhi oleh influencer, budaya populer, dan opini publik dibandingkan pengajaran gerejawi yang sehat (Garner, 2020). Situasi ini menuntut gereja untuk tidak hanya berkhotbah tentang moralitas, tetapi juga membangun kapasitas kritis yang terintegrasi dengan iman Kristen.

Karena itu, gereja secara khusus HKBP Parsaoran Tegal Sari memiliki urgensi untuk membentuk komunitas pemuda yang kritis, matang secara iman, dan melek digital. Gereja tidak dapat lagi hanya mengandalkan metode pembinaan tradisional, tetapi harus mengembangkan pendekatan yang menggabungkan spiritualitas, rasionalitas, dan literasi digital sebagai satu kesatuan formasi iman (Dyer, 2023). Pedagogi kritis menawarkan kerangka yang tepat untuk menjawab tantangan ini, karena pedagogi kritis menekankan kesadaran kritis (*conscientization*), dialog, dan pembebasan dari narasi yang menyesatkan (Freire, 1970). Pembentukan komunitas kritis bukan sekadar strategi teknis, tetapi bagian dari panggilan gereja untuk menjaga integritas kebenaran, melindungi jemaat dari manipulasi digital, serta mempersiapkan pemuda menjadi saksi Kristus yang relevan dalam dunia digital yang kompleks (Brueggemann, 2018). Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menolong gereja memahami akar persoalan, merumuskan strategi formasi, dan menghadirkan gereja sebagai komunitas yang melawan hoaks melalui praktik iman yang cerdas dan bertanggung jawab.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam bagaimana pemuda gereja mengalami, memaknai, dan merespons hoaks dalam kehidupan digital mereka, serta bagaimana pedagogi kritis dapat diterapkan dalam pembinaan pemuda. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena hoaks dalam konteks spesifik HKBP Parsaoran Tegal Sari, sehingga data yang diperoleh bersifat kontekstual dan holistik. Data dikumpulkan melalui tiga teknik: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pemuda, pengurus kategorial, pendeta, dan parhalado untuk memperoleh perspektif dari berbagai pihak. Observasi partisipatif dilakukan dalam kegiatan pemuda, ibadah, dan diskusi non-formal untuk memahami dinamika interaksi dan budaya informasi di lingkungan gereja. Studi dokumentasi meliputi literatur akademik, dokumen gereja, serta konten digital yang beredar di kalangan pemuda.

Analisis data menggunakan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2006), yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan pola-pola makna yang muncul dari data. Proses analisis dilakukan melalui enam tahap: familiarisasi data, pembuatan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penulisan laporan. Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Miles et al., 2014). Refleksivitas peneliti juga dijaga dengan menyeimbangkan peran sebagai peneliti dan anggota komunitas gereja. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan menggeneralisasi, melainkan menghasilkan pemahaman mendalam dan tawaran model pembinaan pemuda anti-hoaks berbasis pedagogi kritis yang dapat diterapkan secara kontekstual di lingkungan gereja.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Hoaks dan Kerentanan Pemuda Gereja di Era Post-Truth

Era post-truth ditandai oleh menguatnya emosi dan keyakinan subjektif di atas fakta, sehingga kebenaran menjadi relatif dan mudah dimanipulasi (Keyes, 2018). Dalam konteks Indonesia, fenomena ini diperparah oleh penetrasi internet yang cepat, kultur media sosial yang memprioritaskan kecepatan dibanding verifikasi, serta rendahnya kebiasaan verifikasi informasi (Lim, 2020). Hoaks bukan lagi sekadar problem teknologi, tetapi problem sosial-budaya yang memengaruhi dinamika persekutuan, termasuk di lingkungan gereja. Pemuda gereja, sebagai kelompok yang paling intens menggunakan media sosial, berada di garis depan paparan *misinformation* dan *disinformation* (Boyd, 2014). Oleh karena itu, memahami realitas hoaks di kalangan pemuda gereja menjadi langkah awal yang penting sebelum merumuskan model pembinaan yang tepat.

Pola konsumsi digital pemuda gereja HKBP Parsaoran Tegal Sari menunjukkan intensitas yang tinggi, terutama pada platform WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube. Media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga kanal utama untuk mendapatkan berita, opini, dan panduan hidup sehari-hari (Campbell, 2016). Pola konsumsi yang cepat, selektif, dan emosional membuat pemuda rentan terhadap konten yang sensasional, viral, atau kontroversial, termasuk hoaks (Heryanto, 2020). Dalam banyak kasus, pemuda menerima informasi tanpa memeriksa sumbernya, sehingga hoaks menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa hoaks telah menjadi bagian dari ekosistem informasi yang dihadapi pemuda gereja sehari-hari.

Jenis hoaks yang paling sering muncul di kalangan pemuda gereja mencakup informasi politik, kesehatan, agama, moral, dan sosial. Dalam ranah politik, pemuda terpapar isu yang menyesatkan tentang calon pemimpin atau kebijakan pemerintah, yang sering dibingkai secara provokatif untuk memicu emosi (Lim, 2020). Dalam ranah kesehatan, informasi palsu mengenai obat, vaksin, atau praktik kesehatan tertentu menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran. Sedangkan di bidang agama dan moral, hoaks sering muncul dalam bentuk klaim ekstrem atau narasi yang memanipulasi

prinsip iman, yang dapat mengganggu pemahaman teologis pemuda dan memicu konflik internal di gereja (Soukup, 2021). Keragaman jenis hoaks ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pemuda gereja tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensi.

Narasi hoaks yang memengaruhi pemuda biasanya memanfaatkan faktor psikologis seperti keinginan untuk diterima, mencari kebenaran instan, dan konfirmasi pandangan pribadi (*confirmation bias*) (Kahneman, 2011). Narasi ini dikemas sedemikian rupa sehingga menimbulkan efek emosional yang kuat, misalnya rasa takut, marah, atau iba, sehingga pemuda terdorong untuk membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi (Sunstein, 2017). Dalam konteks gereja, narasi hoaks yang bernuansa agama atau moral memiliki daya tarik tersendiri karena tampak selaras dengan nilai iman, padahal isinya bisa menyesatkan. Dengan demikian, hoaks tidak hanya menyerang aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan spiritual pemuda.

Fakta lapangan dari wawancara dengan pemuda, pengurus kategorial, pendeta, dan parhalado menunjukkan bahwa hoaks telah menjadi masalah nyata di lingkungan gereja. Pemuda mengaku sering menerima pesan yang tidak jelas sumbernya dan merasa bingung untuk menilai kebenarannya (Limbong, wawancara, 2025). Pengurus kategorial melaporkan bahwa hoaks terkadang memicu ketegangan di antara anggota, terutama ketika isu politik atau sosial dikaitkan dengan iman (Pasaribu, wawancara, 2025). Pendeta dan parhalado menekankan pentingnya peran gereja sebagai pembimbing untuk menanamkan kesadaran kritis dan literasi teologis serta digital, agar pemuda tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi mampu memilah dan menyebarkan kebenaran dengan bertanggung jawab (Simatupang, wawancara, 2025). Data ini menegaskan bahwa hoaks bukan sekadar persoalan eksternal, tetapi telah menyentuh relasi dan kepercayaan di dalam komunitas gereja.

Dampak hoaks terhadap kehidupan bergereja sangat serius. Munculnya polarisasi internal, kecurigaan antarkelompok pelayanan, penurunan kepercayaan terhadap majelis atau pendeta, serta meningkatnya konflik interpersonal menjadi fenomena yang tidak lagi jarang ditemukan (Soukup, 2021). Lebih jauh lagi, hoaks mengikis karakter etis umat karena membiasakan mereka pada cara berpikir reaktif, emosional, dan tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran (Balentine, 2018). Dalam konteks gereja, hal ini berbahaya karena hoaks pada akhirnya memengaruhi spiritualitas jemaat: mereka tidak hanya salah memahami isu publik, tetapi dapat salah memahami kehendak Allah akibat distorsi informasi yang terus-menerus. Dengan demikian, hoaks bukan sekadar ancaman sosial, tetapi ancaman teologis yang memengaruhi integritas iman.

Analisis ini menegaskan bahwa realitas hoaks di kalangan pemuda gereja tidak dapat dipandang remeh. Hoaks bukan sekadar masalah informasi, tetapi menyangkut integritas iman, etika sosial, dan kohesi komunitas gereja. Dengan memahami pola konsumsi digital, jenis hoaks, dan faktor psikologis yang memengaruhi pemuda, gereja dapat merancang strategi pastoral yang lebih tepat sasaran untuk membentuk komunitas kritis yang berakar pada kebenaran dan kasih Kristiani (Brueggemann, 2018). Dalam kerangka pedagogi kritis, pemahaman terhadap realitas hoaks ini menjadi dasar bagi proses penyadaran (*conscientization*) yang memungkinkan pemuda membaca dunia digital secara kritis dan bertanggung jawab.

Pedagogi Kritis sebagai Kerangka Pembinaan Pemuda Anti-Hoaks

Pedagogi kritis yang berakar pada pemikiran Paulo Freire menawarkan kerangka yang relevan untuk menjawab tantangan hoaks di era post-truth. Freire menekankan pentingnya kesadaran kritis (*conscientization*), yaitu kemampuan untuk membaca realitas secara kritis, mempertanyakan asumsi, dan bertindak secara etis (Freire, 1970). Dalam konteks gereja, pedagogi kritis tidak bertentangan dengan iman Kristen, melainkan saling melengkapi. Iman yang dewasa adalah iman yang kritis, yang tidak mudah goyah oleh narasi yang menyesatkan, tetapi berakar kuat pada firman Tuhan dan tradisi gereja (Brueggemann, 2018). Oleh karena itu, pedagogi kritis dapat menjadi fondasi bagi pembinaan pemuda anti-hoaks di lingkungan gereja.

Prinsip pertama pedagogi kritis adalah dialog. Dialog bukan sekadar percakapan biasa, melainkan proses belajar bersama yang melibatkan pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan refleksi (Freire, 1970). Dalam dialog, setiap peserta memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengar, sehingga

tercipta rasa dihargai dan dimiliki. Dialog juga memungkinkan terjadinya koreksi bersama, karena setiap pendapat dapat diuji dan diperkaya oleh pendapat orang lain. Dalam konteks *partungkoan* gereja atau komunitas pemuda, dialog menjadi sarana untuk menguji informasi, membedakan fakta dari opini, dan membangun pemahaman yang lebih utuh tentang kebenaran. Dengan demikian, dialog menjadi antidot terhadap budaya informasi yang reaktif dan emosional.

Prinsip kedua adalah kontekstualitas. Materi pembinaan dalam pedagogi kritis tidak bersifat abstrak, tetapi selalu berkaitan dengan persoalan nyata yang dihadapi pemuda. Topik-topik seperti hoaks politik, kesehatan, agama, dan moral menjadi bahan diskusi yang relevan (Campbell, 2016). Dengan membahas persoalan nyata, pendidikan iman tidak terasa jauh dari kehidupan, tetapi justru menyentuh kebutuhan terdalam peserta. Kontekstualitas juga berarti bahwa pembinaan harus peka terhadap budaya digital yang dihidupi pemuda, sehingga Injil tidak hadir sebagai ajaran asing, melainkan sebagai kabar baik yang menjawab pergumulan konkret mereka.

Prinsip ketiga adalah pembebasan (*liberation*). Pedagogi kritis bertujuan membebaskan peserta didik dari dominasi narasi yang menindas dan menyesatkan (Freire, 1970). Dalam konteks hoaks, pembebasan berarti pemuda tidak lagi menjadi konsumen pasif informasi, tetapi menjadi subjek yang aktif menilai, memverifikasi, dan menyebarkan kebenaran. Pembebasan ini juga berarti pemuda terbebas dari cengkeraman *echo chamber* dan *group polarization* yang mempersempit perspektif (Sunstein, 2017). Dengan demikian, pedagogi kritis tidak hanya membekali pemuda dengan keterampilan teknis, tetapi juga dengan kebebasan berpikir yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama.

Prinsip keempat adalah integrasi literasi digital dan literasi teologis. Literasi digital membekali pemuda dengan kemampuan mengevaluasi sumber informasi, mengenali bias algoritma, membedakan fakta dari opini, dan memahami motif di balik penyebaran konten (Wardle & Derakhshan, 2017). Sementara itu, literasi teologis memungkinkan pemuda memahami prinsip-prinsip iman, menafsirkan Alkitab secara kontekstual, dan mengintegrasikan nilai-nilai etis dalam kehidupan sehari-hari (Dyer, 2023). Kombinasi keduanya membentuk pemuda yang tidak hanya kritis terhadap informasi digital, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai iman, sehingga mampu menjadi saksi kebenaran yang bertanggung jawab.

Prinsip kelima adalah keteladanan. Dalam pedagogi kritis, pendidik bukan hanya pengajar, tetapi juga teladan yang menghidupi nilai-nilai yang diajarkan. Pendeta, penatua, dan pemuda senior berperan sebagai model yang dapat ditiru oleh pemuda lainnya (Moltmann, 2010). Keteladanan ini sangat penting karena pendidikan karakter tidak cukup disampaikan melalui kata-kata, tetapi harus dilihat dan dialami. Dalam konteks anti-hoaks, keteladanan berarti para pemimpin gereja juga harus menjadi contoh dalam hal verifikasi informasi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Dengan demikian, pedagogi kritis tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga transformatif.

Prinsip keenam adalah doa dan firman Tuhan sebagai fondasi. Setiap proses pembinaan dalam pedagogi kritis gerejawi harus diawali dan diakhiri dengan doa, serta menjadikan firman Tuhan sebagai dasar setiap diskusi. Tanpa firman Tuhan, pembinaan hanya akan menjadi pelatihan keterampilan biasa yang tidak menyentuh dimensi spiritual (Saliers, 2016). Firman Tuhan berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan setiap percakapan, sehingga diskusi tidak melenceng menjadi perdebatan tak terarah. Doa juga menjadi sarana untuk mengundang Roh Kudus bekerja dalam proses pendidikan, karena hanya Roh Kudus yang mampu mengubah hati dan membentuk karakter Kristus dalam diri seseorang.

Dengan demikian, pedagogi kritis dapat dirumuskan sebagai pendidikan iman yang dialogis, kontekstual, membebaskan, dan berorientasi pada pembentukan karakter Kristus. Pendidikan ini berlangsung dalam komunitas, melalui keteladanan, doa, firman Tuhan, dan tindakan nyata. Model ini menawarkan alternatif bagi pendidikan Kristen yang selama ini cenderung formal dan satu arah. Dengan mengadopsi semangat pedagogi kritis, gereja dapat menciptakan ruang pendidikan yang lebih hidup, relevan, dan transformatif bagi pemuda maupun seluruh jemaat.

Model Pembinaan Pemuda Anti-Hoaks Berbasis Pedagogi Kritis di HKBP Parsaoran Tegal Sari

Mengingat kerentanan pemuda terhadap hoaks, gereja HKBP Parsaoran Tegal Sari perlu mengembangkan model pembinaan holistik yang mengintegrasikan literasi digital, teologi, dan praktik komunitas. Model ini bertujuan membekali pemuda agar menjadi agen kebenaran yang kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi arus informasi digital (Giban et al., 2023). Berbasis pedagogi kritis Freire (1970), model ini menekankan kesadaran kritis, dialog, dan pembebasan dari narasi yang menyesatkan. Model ini juga menjawab kebutuhan kontekstual pemuda gereja yang hidup di era post-truth, di mana emosi lebih dipercaya daripada fakta (Keyes, 2018).

Model pertama adalah katekisasi literasi digital. Pendekatan katekisasi perlu diperluas dari pembelajaran iman tradisional ke literasi digital berbasis teologi kebenaran (Dyer, 2023). Materi ini mengajarkan pemuda untuk memahami prinsip kebenaran dalam Alkitab (mis. Efesus 4:25, Yohanes 8:32) sekaligus teknik verifikasi informasi, mulai dari cek sumber, analisis kredibilitas media, hingga identifikasi berita palsu (Brueggemann, 2018). Dalam kerangka pedagogi kritis, katekisasi ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses penyadaran kritis terhadap realitas digital. Dengan demikian, pemuda tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi belajar menilai kebenaran melalui lensa iman dan rasio.

Model kedua adalah komunitas diskusi kritis pemuda. Gereja dapat membentuk komunitas *peer learning* yang mengutamakan dialog dan refleksi Alkitab (Freire, 1970). Forum ini menyediakan ruang bagi pemuda untuk berdiskusi kritis, mengajukan pertanyaan, dan menguji asumsi terhadap informasi yang mereka terima. Budaya dialog semacam ini membantu pemuda melatih kemampuan analisis, membangun empati, dan memperkuat kohesi komunitas (Boyd, 2014). Dalam komunitas ini, pemuda belajar untuk tidak takut bertanya, tidak mudah menghakimi, dan terbuka terhadap koreksi. Dengan demikian, komunitas diskusi kritis menjadi laboratorium iman yang hidup dan relevan.

Model ketiga adalah pelatihan *digital discernment*. Pelatihan ini membekali pemuda dengan keterampilan teknis dan kognitif untuk menghadapi informasi digital (Campbell, 2016). Fokusnya meliputi: mengenal algoritma, yaitu bagaimana konten diprioritaskan di media sosial; mengenal bias, yaitu pengaruh *confirmation bias* dan *echo chamber*; serta belajar membaca data, yaitu kemampuan analisis informasi numerik dan kontekstual untuk membedakan fakta dari opini. Pelatihan ini penting karena pemuda tidak hanya perlu tahu *apa* yang benar, tetapi juga *mengapa* informasi tertentu lebih mudah viral dan *bagaimana* memverifikasinya. Dengan demikian, pelatihan *digital discernment* membekali pemuda dengan kompetensi yang dibutuhkan di era post-truth.

Model keempat adalah khotbah dan PA tematik kebenaran informasi. Gereja dapat menggunakan khotbah dan persekutuan anggota (PA) sebagai media pembinaan tematik mengenai kebenaran informasi (Saliers, 2016). Dengan pendekatan ini, pemuda diajak merenungkan tanggung jawab etis sebagai anggota Tubuh Kristus, memahami dampak hoaks terhadap sesama, dan mempraktikkan disiplin rohani dalam konsumsi informasi. Khotbah dan PA tematik ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan spiritual, karena menyentuh hati dan membentuk sikap. Dengan demikian, pembinaan anti-hoaks tidak hanya menjadi program teknis, tetapi menjadi bagian dari formasi iman yang menyeluruh.

Model kelima adalah tim *fact-checking* gereja. Gereja dapat membentuk tim kader pemuda yang bertugas sebagai agen edukasi dan pengecek fakta (Simatupang, wawancara, 2025). Tim ini berfungsi menanggapi hoaks di lingkup jemaat, memberikan klarifikasi, dan menyebarkan informasi yang akurat. Pendekatan ini memperkuat kultur akuntabilitas dan membangun kepercayaan dalam komunitas gereja. Dalam kerangka pedagogi kritis, tim *fact-checking* bukan hanya bertugas mengecek fakta, tetapi juga memberdayakan pemuda untuk menjadi agen kebenaran yang aktif. Dengan demikian, tim ini menjadi wujud nyata dari misi gereja sebagai penjaga kebenaran di ruang digital.

Model keenam adalah kolaborasi pemuda-pendeta-parhalado. Model ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemuda, pendeta, dan parhalado untuk membangun kultur nalar sehat (Leksana, 2025). Melalui koordinasi ini, pemuda memperoleh bimbingan teologis, keterampilan literasi digital, dan pengalaman komunitas yang mendukung pengambilan keputusan berbasis kebenaran.

Kolaborasi ini juga memperkuat pemuridan digital dan membentuk komunitas yang resilien terhadap informasi menyesatkan (Gideon & Julianes, 2024). Dalam kerangka pedagogi kritis, kolaborasi ini mencerminkan prinsip dialog dan kesetaraan, di mana pemuda tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam membangun komunitas.

Dengan implementasi keenam model ini, HKBP Parsaoran Tegal Sari mampu membentuk pemuda anti-hoaks yang berpikir kritis, bertindak etis, dan mempraktikkan iman yang reflektif dalam dunia digital. Model ini tidak hanya menjawab tantangan hoaks secara teknis, tetapi juga membentuk karakter Kristus dalam diri pemuda, sehingga mereka menjadi saksi kebenaran yang relevan di era post-truth. Pada akhirnya, pembinaan pemuda anti-hoaks berbasis pedagogi kritis bukan sekadar strategi teknis, tetapi bagian dari misi gereja untuk menjaga integritas kebenaran, melindungi jemaat dari manipulasi digital, dan mempersiapkan pemuda menjadi agen transformasi sosial dan digital (Campbell, 2020).

4. KESIMPULAN

Era post-truth ditandai oleh menguatnya emosi dan keyakinan subjektif di atas fakta, sehingga hoaks menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial, termasuk komunitas gereja (Keyes, 2018). Pemuda gereja, khususnya di HKBP Parsaoran Tegal Sari, merupakan kelompok yang rentan terhadap disinformasi digital karena tingginya intensitas penggunaan media sosial, lemahnya literasi digital, minimnya literasi teologis, serta absennya budaya dialog kritis di gereja (Boyd, 2014; Campbell, 2016). Kerentanan ini diperparah oleh faktor psikologis seperti *confirmation bias*, *echo chamber*, dan *group polarization*, yang membuat pemuda lebih mudah percaya dan menyebarkan hoaks tanpa verifikasi (Kahneman, 2011; Sunstein, 2017). Dampaknya bukan hanya polarisasi dan konflik internal, tetapi juga degradasi moral dan ancaman terhadap integritas iman, karena hoaks dapat mendistorsi cara pemuda memahami kehendak Allah dan kebenaran Kristiani (Balentine, 2018; Soukup, 2021). Oleh karena itu, hoaks bukan sekadar persoalan teknologi atau sosial, melainkan persoalan teologis dan pastoral yang menuntut respons serius dari gereja.

Menjawab tantangan tersebut, pedagogi kritis yang berakar pada pemikiran Paulo Freire menawarkan kerangka yang relevan untuk membentuk pemuda anti-hoaks. Pedagogi kritis menekankan kesadaran kritis (*conscientization*), dialog, kontekstualitas, dan pembebasan dari narasi yang menyesatkan (Freire, 1970). Berbasis kerangka ini, artikel ini merumuskan enam model pembinaan: katekisasi literasi digital, komunitas diskusi kritis, pelatihan *digital discernment*, khotbah dan PA tematik, tim *fact-checking* gereja, serta kolaborasi pemuda-pendeta-parhalado (Dyer, 2023; Giban et al., 2023; Leksana, 2025). Model ini mengintegrasikan literasi digital, literasi teologis, dan praktik komunitas dalam satu kesatuan formasi iman, sehingga pemuda tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga karakter Kristus yang kritis, etis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembinaan pemuda anti-hoaks berbasis pedagogi kritis bukan sekadar strategi teknis, melainkan bagian dari misi gereja untuk menjaga integritas kebenaran, melindungi jemaat dari manipulasi digital, dan mempersiapkan pemuda menjadi agen transformasi sosial dan digital yang relevan di era post-truth (Brueggemann, 2018; Campbell, 2020).

REFERENSI

- Balentine, S. E. (2018). *The ethical vision of the Bible*. Westminster John Knox Press.
- Bonhoeffer, D. (2005). *Ethics*. Fortress Press.
- Boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Brueggemann, W. (2018). *Truth and hope: Essays for a perilous age*. Westminster John Knox Press.
- Campbell, H. A. (2016). *Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds*. Routledge.

- Campbell, H. A. (2020). The rise of the religious digital creatives. *Social Media + Society*, 6(3), 1–6. <https://doi.org/10.1177/2056305120948253>
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society*. Blackwell.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Diskominfo Jawa Tengah. (2022, November 23). *Laporan isu hoaks harian*.
- Dyer, J. (2023). *People of the screen: How evangelicals created the digital Bible and how it shapes their reading of Scripture*. Oxford University Press.
- Erikson, E. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Garner, S. (2020). Theology and the digital public sphere. *Journal of Religion, Media and Digital Culture*, 9(2), 155–170.
- Giban, Y., Legi, H., & Payage, N. (2023). *Pendidikan Agama Kristen dalam dinamika zaman: Teologis, praktika, refleksi, dan gagasan*. Publica Indonesia.
- Gideon, G., & Julianes, M. (2024). Transformasi pendidikan Kristen dalam misi pemuda: Strategi efektif di era digital. *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology*, 112–116.
- Gulo, R., Zamasi, S., & Nedo, H. (2023). Strategi pemuda gereja dalam mempertahankan kecintaan pada iman Kristen di era digital. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 2(2), 161–166.
- Heryanto, A. (2020). Digital populism and the crisis of facts in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 48(3), 260–263. <https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1794588>
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Keyes, R. (2018). *The post-truth era: Dishonesty and deception in contemporary life*. St. Martin's Press.
- Leksana, D. (2025, April). Teologi pastoral di era digital: Kontekstualisasi pelayanan gereja dalam perspektif teologi digital di Indonesia. *Teologi.Digital*.
- Lim, M. (2020). *Seeing internet and social media as cultural technologies: A critical perspective*. ISEAS Publishing.
- Lim, M. (2020). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 52(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2020.1771742>
- Liputan6. (n.d.). *Sederet hoaks yang memakan korban hingga merenggut nyawa*. [Liputan6.com](https://liputan6.com).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moltmann, J. (2010). *The church in the power of the Spirit*. SCM Press.
- Nouwen, H. J. M. (1979). *The wounded healer*. Image Books.
- Puspita, H. (2023, Februari 1). Hoaks penculikan semakin liar di medsos. *Radar Bali*.
- Saliers, D. E. (2016). *Spirituality and liturgical music: Theology, ritual, and experience*. Oxford University Press.
- Smith, J. K. A. (2009). *Desiring the kingdom: Worship, worldview, and cultural formation*. Baker Academic.
- Soukup, P. A. (2021). Communication, misinformation, and the church. *Communication Research Trends*, 40(2), 12–15.
- Sunstein, C. R. (2017). *Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Toffler, A. (1980). *The third wave*. Bantam Books.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- Volf, M. (1996). *Exclusion and embrace: A theological exploration of identity, otherness, and reconciliation*. Abingdon Press.
- Wardle, C. (2019). Thinking critically about digital literacy for youth. *Journal of Media Literacy Education*, 11(2), 12–18.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework*. Council of Europe.
- Wright, N. T. (2015). *Scripture and the authority of God*. HarperOne.